

ABSTRAK

Febriyanti Kadir. 921 409 040. 2013. Varians Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Skripsi, Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Bapak Imran R. Hambali S.Pd, SE, M.SA dan Pembimbing II ibu Nilawaty Yusuf SE.Ak, M.Si.

Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu seberapa besar terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango. Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dalam bentuk dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010, 2011 dan 2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis varians, analisis trend dan uji t-hitung one sample.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja Pemerintah Daerah di DPPKAD Kabupaten Bone Bolango. Hal ini dibuktikan dengan adanya besarnya selisih antara anggaran dan realisasi anggaran belanja pada Pemerintahan Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari analisis varians yang selisih anggarannya tahun 2010 sebesar 6,06%, tahun 2011 sebesar 8,78% dan tahun 2012 sebesar 7,45% sedangkan menggunakan analisis trend yaitu grafik menunjukkan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi serta menggunakan uji t-hitung one sample terlihat penyimpangan pada anggaran dan realisasi belanja tidak terduga yaitu nilai t-hitung hanya sebesar 1.929 sedangkan standar nilai t-hitung sebesar 2.353.

Kata Kunci: varians anggaran dan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah.